BAB II

RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Perusahaan

PT. PLN (PERSERO) Indonesia berkembang dari masa ke masa, dari jaman penjajahan hingga kini. Pengusahaan tenaga Listrik Indonesia berdiri sejak tahun 1897 oleh N.V.NIWEM(Nederland Indische Waterkracht Electricitets mattschaapi) dengan wilayah usahanya meliputi Batavia, kebayoran, Tangerang, medan, Makasar, Manado, Tanjung karang dan Aceh. Pembangunan kelistrikan di wilayah Indonesia terjadi sebagai berikut :

a. Elektrifikasi di wilayah kota Batavia sekitar tahun 1893 merupakan Stads Bedrijf yang dikelola oleh Pemerintah Daerah setempat dengan nama Electroteit Bedrijf Batavia.
b. Elektrifikasi di wilayah kota Medan sekitar tahun 1903 sebagai Stads Bedrijf yang dikelola oleh pemerintah daerah dengan nama Elektricteit Bedrijf Medan (Deli).
c. Elektrifikasi di wilayah kota Surabaya kira-kira tahun 1907, merupakan Stads Bedrijf yang dikelola oleh pemerintah Daerah dengan nama Electricteit Bedrijf Surabaya.

Beberapa perusahaan listrik yang berkembang dari masa penjajahan hingga kini diantaranya yaitu: pada zaman Hindia Belanda, zaman Jepang, masa setelah proklamasi kemerdekaan dan nasionalisasi perkembangan di Indonesia serta perkembangan organisasinya hingga sekarang.

1. PERUSAHAAN LISTRIK ZAMAN HINDIA BELANDA.

Setelah perusahaan listrik yang berpusat di negeri Belanda didirikan dibeberapa wilayah Indonesia (umumnya pembangkitan) maka pendistribusian tenaga listrik oleh pemerintah Daerah dialirkan kepada Perusahaan listrik Swasta. Menurut pencatatan pendirian perusahaan listrik Belanda di Indonesia terjadi sebagai berikut:

Perusahaan listrik NV KIGK yang kemudian namanya berubah NV OGEM.

a. Izin beroperasi dikeluarkan dengan Surat Keputusan No. 28 tanggal 27 Juni 1913 pemberian konsesi untuk melistriki wilayah kota Batavia.
b. Izin beroperasi dikeluarkan dengan Surat Keputusan No. 29 tanggal 1 November 1915 pemberian konsesi untuk melistriki wilayah kota Messterconnelis (Jatinegara).
c. Izin beroperasi diberikan dengan Surat Keputusan No. 14 tanggal 17 Mei 1924 pemberian konsesi untuk melistriki wilayah kota Tanggerang.
d. Izin beroperasi dikeluarkan dengan Surat Keputusan No. 6 November 1924, pemberian konsesi untuk melistriki wilayah Kota Cirebon.
e. Izin beroperasi dikeluarkan dengan Surat Keputusan No. 20 tanggal 25 Nopember 1925, pemberian konsesi untuk melistriki wilayah kota kebayoran lama.

f. Izin beroperasi dikeluarkan dengan Surat Keputusan No. 12 tanggal 16 Juni 1927 pemberian konsesi untuk melistriki wilayah Cirebon Luar kota.

Pemberian beroperasi kepada NV NIGM di luar jawa antara lain dikeluarkan untuk wilayah kota Medan kemudian secara berturut-turut menyusul wilayah Palembang, Makasar atau Ujungpandang, Tanjungkarang (Lampung) dan Manado.

2. PERUSAHAAN LISTRIK DI JAMAN JEPANG.

Dalam perang dunia ke dua semua Perusahaan Listrik di wilayah Indonesia dengan sendirinya berada dibawah pengawasan Tentara Jepang, antara lain Perusahaan Listrik Belanda yang berada dibawah Angkatan Darat Jepang, dijadikan Perusahaan Listrik Jepang dengan nama sebagai berikut:

a. Jawa Denki Jigyokoska Kantor Pusat di Jakarta.
b. Seibu Jawa Denki Sha di wilayah Jawa Barat.
c. Chobu Jawa Denki Sha di wilayah Jawa Tengah.
d. Tobu Jawa Denki Sha di wilayah jawa Timur.
e. Cabang-cabang Perusahaan Listrik tetap seperti semula, sambil kelanjutan.

Dengan berdirinya menjadi perusahaan Listrik Jepang dibawah pengawasan Angkatan Darat maka pimpinan Perusahaan dipegang oleh Tenaga yang didatangkan dari Jepang.

3. PERUSAHAAN LISTRIK SETELAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN.

Perang Dunia ke dua diakhiri dengan pernyataan menyerahnya jepang kepada sekutu tanggal 14 Agustus 1945. Dengan menyerahnya Jepang kepada Sekutu berarti pula bahwa Tentara Sekutu akan memasuki dan menduduki wilayah Indonesia yang dikuasai Tentara Jepang untuk melucuti Tentara Jepang dan membebaskan warga negara Sekutu yang ditawan oleh Jepang.

Sebelum sekutu mengambil alih kekuasaan dari penguasa Jepang, pimpinan-pimpinan Indonesia telah mendahului memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia menjadi Replubik Indonesia. Berkumandangnya proklamasi kemerdekaan Replubik Indonesia pada waktu itu. Bung Karno mengembleng rakyat pada rapat raksasa di lapangan Ikada pada tanggal 19 September 1945. Karena dihalangi tentara Jepang telah menimbulkan pengaruh setarasa tidak puas tidak saja dikalangan rakyat tetapi juga telah menggugah hati serta mempertebal tekad para karyawan Perusahaan listrik untuk menempuh jalan mengambil alih segera Pimpinan listrik dari penguasa Jepang.

Pengambilan alih Pimpinan Perusahaan Listrik pertama-tama terjadi pada tanggal 21 September 1945 di pusat (jawa denki jezyp kosaha) Jakarta oleh kesatuan aksi karyawan listrik, setelah gagalnya rapat tanggal 19 September 1945 dan dalam hari berikutnya pengambilan alih meluas ke daerah lainnya seperti, perusahaan listrik di daerah Surabaya, Semarang, Bandung, Yogyakarta dan berbagai kota lainnya di pulau Jawa atau di luar pulau Jawa. Kesatuan aksi para karyawan perusahaan listrjk pengusaha jepang secara keseluruhan dapat diambil alih pimpinan dari perusahaan listrik pengusaha

jepang secara keseluruhan dapat diambil dan diselesaikan pada pertengahan bulan oktober 1945.

Perusahaan-perusahaan listrik yang telah ada diambil alih dari penguasa jepang kemudian oleh kesatuan aksi karyawan perusahaan listrik diserahkan kepada pemerintah departemen pekerjaan umum dan tenaga di Jakarta.

Dengan penetapan pemerintah no. 1 sd/1945 tanggal 27 oktober 1945 merupakan hari dan tanggal yang sangat bersejarah bagi karyawan listrik generasi 1945, karena hari tersebut ditetapkan hari jadi listrik yang telah diperolehnya melalui perjuangan pengambil alihan yang cukup berat dan banyak meminta pengorbanan baik yang gugur maupun yang cacad dan kehilangan harta terjadi di seluruh Indonesia sebagai menisfestasi perjuangan, karyawan listrik ikut mengisi dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selama revolusi kemerdekaan daerah yang diduduki belanda tentunya dikuasai oleh mereka.

Dalam salah satu persetujuan hasil konverensi meja bundar negeri belanda antara lain ditetapkan bahwa kecuali perusahaan milik pemerintah (landswaterkracht bedrijven atau lwb), semua perusahaan listrik dikembalikan pada pemiliknya sebelum perang, ialah perusahaan listrik belanda seperti antara lain: NV, ANIEM, NV, GEBEO, NV, OGEM dan sebagainya.

Setelah penyerahan kedaulatan dari pemerintah belanda ke republik Indonesia serikat yang kemudian menjadi negara kesatuan republik Indonesia, perusahaan listrik yang beroperasi di Indonesia adalah perusahaan listrik asing/belanda antara lain: NV, ANIEN, NV, GEBEO, NV, OGEN dan

sebagainya kecuali pembangkitan tenaga listrik yang semula LWB tetap dikuasai pemerintah republik Indonesia dengan nama PLN. Panupetel/direksi pembangkitan yang bernaung dibawah direktorat jenderal ketenagaan kementrian PUT.

4. NASIONALISASI PERUBAHAN LISTRIK INDONESIA.

Tuntutan nasionalisasi perusahaan listrik belanda merupakan salah satu program organisasi buruh (sblgi) non-Vaksetral. Dalam melaksanakan program perjuangannya masalah nasinalisasi perusahaan listrik oleh ketua umum PB SELGI kobarsih dibawa ke forum dewan perwakilan rakyat dan dapat menjadi "wesi sidik joyosukarto cs" yang diterima dengan aklamasi oleh sidang DPR pada tahun 1952 atas dasar habisnya masa konsesi yang diberikan perusahaan listrik belanda.

Pelaksanaan nasionalisasi terhadap perusahaan listri NV. OGEM untuk Jakarta dan cirebon terjadi pada 1 januari 1954 untuk terhadap NV. ANIEM terjadi pada tanggal 1 Nopember 1954 untuk pelistrikan wilayah jawa timur dan jawa tengah.

5. PERKEMBANGAN ORGANISASI HINGGA SEKARANG.

Sebagai tindak lanjut setelah pembentukan dewan direktur, maka untuk mempersatukan kelistrikan diseluruh wilayah Indonesia yang semula terdiri dari PENUDITEL, PENUPUTEL dan EKS PERUSAHAAN LISTRIK yang diambil alih tahun 1957 oleh pemerintah kemudian dimasukan dalam satu wadah badan pemimpinan umum perusahaan listrik yang dibentuk berdasarka

pada landasan undang-undang no. 19 tahun 1960 dengan keputusan menteri PUT NO> 16/1/PO tanggal 20 Mei 1961.

Pada tahun 1965 struktur organisasi perusahaan liostrik negara di seluruh wilayah Indonesia ditetapkan menjadi 14 (empat belas) kesatuan wilayah dengan cabang-cabang yang terdiri dari:

- 12 (dua belas) PLN EKS ploitasi Distribusi
- 1 (satu) PLN EKS ploitasi Pembangkitan
- 1 (satu) PLN Gas

Gas tahun 1965 dengan peraturan PUT no 9/PRT/1964 BPU PLN dibekukan dan dengan peraturan NO 1/PRT/1965 dua (2) perusahaan listrik dan gas dipecah menjadi :

a. Perusahaan listrik negara (PLN)
b. Perusahaan gas negara (PGN)

Dalam struktur organisasi khusus PLN yang baru, ditetapkan 15 buah kesatuan wilayah eksploitasi dimana masing-masing eksploitasi termasuk sektor pembangkitan.

2.2 Tempat dan Kedudukan Perusahaan

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten bertempat di jalan Soekarno Hatta No. 436 Bandung 40255, yang berkedudukan di bawah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang bertanggung jawab kepada Menteri Negara BUMN.

2.3 Bentuk dan Badan Hukum Perusahaan

Instansi ini merupakan perseroan adalah PT. PLN (Perseroan) yang di dirikan berdasarkan Akte Notaris Sutjipto, S.H. No. 169 Tahun 1994, beserta perubahannya.

2.4 Bidang Pekerjaan Perusahaan

Adapun sebagai bidang pekerjaan dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten adalah dalam bidang penjualan jasa listrik, seperti instalasi arus listrik.

2.5 Bidang Pekerjaan Divisi/Departemen Tempat Kerja Praktek

Kami di tempatkan pada Sub Bagian Niaga. Adapun bidang pekerjaan dari divisi tempat kerja praktek kami adalah:

1. Sub bagian Niaga adalah yang berfungsi memfasilitasi unit garis depan dalam memaksimalkan kinerja melalui fungsi sistem informasi, administrasi niaga, sistem pelayanan dan strategi pemasaran.
   a. Fungsi Sistem Informasi.

      Mengelola pengoperasian dan pemeliharaan seluruh sistem informasi terpadu dan andal (komitmen proses bisnis, password dan data logger); pengembangan sistem informasi untuk meminimalkan proses bisnis manual a.l. RBM berbasis GIS dan gardu;

   b. Fungsi Administrasi Niaga

      Membuat laporan yang benar (rekonsiliasi dengan fungsi keuangan dan akuntansi APJ dan unit yang bersangkutan), dan

menyampaikannya ke KD a.l. TUL.III-07, koreksi dan TUL.III-09, 12RB; TUL.IV-04/06, Pendapatan lain-lain; mengelola tagihan tertentu "terpusat" a.l. TNI, Polri, Pemda, Instansi vertical, SPT;

c. Fungsi Sistem Pelayanan

Mengelola perbaikan penetrasi segmen TR dengan pendekatan territorial a.l. perbaikan AIL, DIL, baca meter; penagihan (autodebet, Praqtis); penerbitan (Kwh numpuk, tunggakan/pemutusan, Illegal, UJL, dll); otomatisasi (RBM, PDE); TMP; LHL; one stop service; kehumasan (a.l. TDL), kemitraan; outsourcing; UGD baru; penyedian material, dana, sarana dan pelatihan;

d. Fungsi Stategi Pemasaran.

Memperbaiki sistem pelayanan potensial untuk memaksimalkan kinerja PJ, khususnya segmen konsumen tegangan tinggi dan tegangan menengah, a.l. Account Executives, CIS, DPP, AIL, PB/PD Dan Daftar tunggu, Captive, Impor, Fleksibilitas dan Sinergi. Tunggakan/KP2LN, UMTL, Pembayaran langsung, Updating PJBTL, dan lain-lain.

2. Rincian Tugas Sub Bagian Niaga:

a. Bekerjasama dengan Asisten Manajer Perencanaan dan Distribusi, Asisten SDM dan Keuangan, Ahli, fungsi terkait di APJ dan Unit Garis Depan untuk memaksimalkan kinerja APJ serta Distribusi Jawa Barat dan Banten, khususnya penekanan susut dan tunggakan.

Antara lain upaya Unit Garis Depan untuk program gardu sisipan (sekaligus untuk perbaikan tegangan dan pemasaran), pemutusan sementara dan rampung, program sambungan jenis "compression" untuk mengatasi "asimetris dan los kontak", melanjutkan perbaikan data pelanggan (DIL) terpadu (sekaligus program analisis susut per penyulang dan per gardu dan program pengurangan tagihan listrik akibat TMP tidak terpenuhi), pemanfaatan anggaran, penyediaan likuiditas operasional Unit Garis Depan, rekonsiliasi penerimaan pembayaran rekening listrik di rekening Bank PLN, pengembangan "Autodebet", program kehumasan, pengembangan sarana, apresiasi dan promosi pegawai, pengembangan Unit Garis Depan Baru, dan lain-lain.

b. Mengkoordinasikan fungsi-fungsi Supervisor, Ahli, Juru Utama dan Juru di lingkungan Bagian Niaga dan bertanggung jawab kepada Manajer APJ.

2.6 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi merupakan wadah dimana seluruh personil terkoordinir dalam menjalankan aktivitas operasi instansi/perusahaan. Dalam organisasi setiap unit dapat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh sebuah instansi/perusahaan. Struktur organisasi pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten adalah suatu saluran hubungan yang menunjukkan pembagian wewenang dan tanggung jawab di dalam instansi tersebut.

Struktur organisasi yang terdapat pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten terdiri dari:

1. MANAJER AREA

   Manajer membawahi Ahli Madya/Muda, Asisten Manajer Niaga, Asisten Manajer Perencanaan dan Distribusi, Asisten Manajer SDM dan Keuangan. Dengan mempunyai fungsi sebagai berikut:

   a. Kinerja utama : rasio operasi, susut, piutang, kepuasan pelanggan, dan citra perusahaan, disamping kinerja unit lainnya.

   b. Uraian fungsi utama :

      - Mensinergikan seluruh unit garis depan dan seluruh fungsi di APJ dalam mengoptimalkan sunberdaya dan kemitraan untuk memaksimalkan Kinerja Unit dan Citra Perusahaan berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku, termasuk surat kuasa dan Kebijakan General Manager, termasuk pengembangan sistem informasi terintegrasi dan "online" dan pengembangan garis depan baru.
      - Menjalin komunikasi dan hubungan kerja internal dan eksternal yang efektif dan mengembangkan dan memberdayakan seluruh potensi SDM untuk meningkatkan Budaya Perusahaan (Integritas, saling percaya, peduli dan pembelajar) dan Good Corporate Government (Responsibility, Accountability, Fairness dan Transparancy) disertai apresiasi dan pembinaan SDM.

- Berkoordinasi dengan unit P3B terkait, APD (bila ada), Unit Distribusi lain (bila ada) dan APJ yang berbatasan.
- Melengkapi pengaturan lebih lanjut (yang belum diatur oleh kantor distribusi), melaksanakan Monitoring dan evaluasi / audit internal.

2. AHLI :
   a. Membuat rekomendasi solusi masalah dan konsep realistis untuk memaksimalkan kinerja APJ.
   b. Melaksanakan kegiatan tertentu, bekerja sama dengan unt garis depan dan atau fungsi terkait, termasuk operasional lapangan, untuk memaksimalkan kinerja APJ dengan persetujuan manajer atau asisten manajer yang bersangkutan.
   c. Bertanggung jawab kepada manajer APJ.
3. ASISTEN MANAJER NIAGA
   a. Fungsi utama Asisten Manajer Niaga adalah mempasilitasi unit garis depan dalam memaksimalkan kinerja, dengan membawahi:
      - Supervisor Sistem Informasi.
      - Supervisor Administrasi Niaga
      - Supervisor Sistem Pelayanan
      - Supervisor Stategi Pemasaran.
   b. Bekerjasama dengan Asisten Manajer Perencanaan dan Distribusi, Asisten SDM dan Keuangan, Ahli, fungsi terkait di APJ dan Unit

Garis Depan untuk memeksimalkan kinerja APJ dan Distribusi Jawa Barat dan Banten, khususnya penekanan susut dan tunggakan.

c. Mengkoordinasikan fungsi-fungsi Supervisor, Ahli, Juru Utama dan Juru di lingkungan Bagian Niaga dan bertanggung jawab kepada Manajer APJ.

4. ASISTEN MANAJER PERENCANAAN DAN DISTRIBUSI

a. Fungsi utama Asisten Manajer Perencanaan dan Distribusi adalah: Mengelola fungsi perencanaan terpadu dan fungsi pengelolaan sistem terdistribusi, bekerja sama dengan Ahi dan fungsi terkait di APJ, untuk memfasilitasi unit garis depan dalam memaksimalkan kinerjanya.

b. Mengkoordinsi pemanfaatan anggaran bersama Asisten Manajer Niaga, Asisten Manajer SDM dan Keuangan dan unit garis depan untuk memaksimalkan kinerja, khususnya penekanan susut dan tunggakan antara lain upaya unit garis depan untuk program gardu sisipan, pemutusan sementara dan rampung, program sambungan jenis "Compression" untuk mengatasi "asimetris dan loskontak", melanjutkan perbaikan data pelanggan terpadu, pengembangan unit garis depan baru, dan lain-lain.

Asisten Manajer Perencanaan dan Distribusi membawahi:

- Supervisor Perencanaan dan Konstruksi
- Supervisor Pemeliharaan Jaringan
- Supervisor Penerangan dan Perakitan

- Supervisor Sistem Pengendalian Meter

5. ASISTEN MANAJER SDM DAN KEUANGAN

   a. Fungsi utama Asisten Manajer SDM dan Keuangan adalah:

      Mengelola fungsi keuangan, fungsi SDM dan organisasi, fungsi administrasi, hukum dan komunikasi, bekerjasama dengan Ahli dan fungsi terkait di APJ, untuk memfasilitasi unit garis depan dalam memaksimalkan kinerjanya.

   b. Mengkoordinasikan penyediaan likuiditas operasional unit garis depan, rekonsiliasi penerimaan pembayaran rekening listrik di rekening Bank PLN, pengembangan "Autodebet", program kehumasan, pengembangan sarana, apresiasi dan promosi pegawai, penyediaan material pada setiap saat dibutuhkan, pengembangan unit garis depan baru, dan lain-lain. Bersama Asisten Manajer Niaga, Asisten Manajer Perencanaan dan Distribusi serta Unit garis depan yang bersangkutan.

   Asisten Manajer SDM dan Keuangan membawahi:

   - Supervisor Pengendalian Anggaran dan Keuangan
   - Supervisor Pengendalian Pendapatan
   - Supervisor Akuntansi
   - Supervisor SDM
   - Supervisor Sekretariat
   - Supervisor Asset dan Logistik.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM